

Manajemen Bencana Responsif Gender: Kajian Inovasi Layanan Organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta

Ratu Riyaning Arum Parasasri, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta

raturiyaniarum@student.uns.ac.id

Abstrak

Surakarta merupakan salah satu kota yang memiliki potensi bencana alam. Selama 2015-2019, terdapat 20 kejadian bencana alam mulai dari banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Bencana tersebut menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, terutama bagi perempuan dan anak-anak sebagai kelompok rentan. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), perempuan memiliki risiko 14 kali lebih tinggi dibanding laki-laki dewasa. Artikel ini membahas tentang bagaimana dimensi perempuan dalam identifikasi, desain, implementasi, dan evaluasi program manajemen bencana, bentuk-bentuk inovasi layanan organisasi BPBD Surakarta dalam mewujudkan manajemen bencana responsif gender serta kendala dalam pelaksanaan inovasi layanan. Data penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif dan analisis gender Harvard step 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi perempuan telah diperhitungkan dalam program inovasi layanan manajemen bencana responsif gender dengan cara memperhatikan kebutuhan perempuan. Terdapat enam program inovasi layanan dan empat kendala dalam pelaksanaan inovasi layanan manajemen bencana responsif gender. Keenam program tersebut adalah penggunaan data pilah gender, sosialisasi kebencanaan dan mitigasi khusus untuk perempuan, pelatihan dapur umum dan evakuasi khusus perempuan, partisipasi keanggotaan forum kelurahan tangguh bencana, pemulihan trauma pasca bencana, serta program “Jitu Pasna”. Sedangkan keempat kendala tersebut adalah kesulitan teknis, sumber daya manusia, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

Kata Kunci: *Inovasi Layanan Organisasi, Manajemen Bencana Responsif Gender*

Pendahuluan

Sebagai negara yang terletak di daerah rawan, Indonesia memiliki berbagai risiko bencana untuk dihadapi mulai dari tanah longsor,

gempa bumi, puting beliung, hingga tsunami. Kondisi tersebut dikarenakan Indonesia secara geografis merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia

dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari Pulau Sumatera-Jawa - Nusa Tenggara- Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa (BNPB, 2017). Bencana merupakan suatu peristiwa mendadak yang memberikan dampak kerugian yang besar atau gangguan serius bagi masyarakat baik dalam hal nyawa, material, maupun lingkungan dan kerugian tersebut diperkirakan melampaui batas kapasitas masyarakat yang terdampak untuk mengatasi permasalahan dampak tersebut (Mayner & Arbon, 2015; Shaluf & Ahmadun, 2006).

Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang termasuk dalam wilayah provinsi Jawa Tengah yang tidak luput dari bencana alam. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), disebutkan bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir terdapat 20 kejadian bencana alam yang terjadi di Surakarta terdiri dari bencana alam banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Sedangkan, 10 kejadian diantaranya adalah banjir. Kota Surakarta sebagai

salah satu kota yang memiliki beberapa potensi bencana alam memiliki tingkat kerentanan dan permasalahan gender yang hampir sama dengan kota-kota lain secara umum.

Gender merupakan konsep yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural/budaya atau bukan merupakan konstruksi biologis, yang mana mengacu pada klasifikasi sosial 'maskulin' dan 'feminin', peran, harapan, nilai dan norma masyarakat untuk membedakan sifat-sifat nonlahiriah antara laki-laki dan perempuan (Fakih, 2016; Phillips, 2005; Oakley, 2015). Isu atau persoalan gender sendiri tidak dapat dilepaskan dari persoalan budaya, dimana ketika seseorang tumbuh maka mereka akan mengadopsi peran gender yang meliputi tentang bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya berpikir, bertindak, dan merasa sesuai tuntutan budayanya (Crawford & Unger, 2000). Ketika berbicara mengenai masalah gender, maka ada dua masalah yang terkait dengan gender yaitu masalah relasi antara laki-laki dengan perempuan dan masalah perbedaan posisi antara laki-laki dengan perempuan.

Kota Surakarta yang memiliki penduduk dengan jenis kelamin perempuan yang lebih banyak dibandingkan laki-laki, memiliki permasalahan gender dan kerentanan perempuan pada saat terjadi bencana lebih kompleks dan banyak ditemukan dibandingkan dengan kerentanan dan permasalahan gender laki-laki. Perempuan memiliki banyak keterbatasan yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional disebabkan hilangnya akses perempuan ke sumberdaya seperti alat perlindungan dari bahaya bencana dan modal finansial yang mana itu tersedia bagi laki-laki karena adanya hubungan kekuasaan yang tidak setara, sehingga perempuan bersama kelompok rentan lainnya seperti anak-anak, orang tua dan penyandang disabilitas menjadi rentan terhadap bencana baik pada saat bencana maupun pasca bencana (Gaillard et al., 2016; Chineka, Musyoki, Korl, & Chikoore, 2019; Enarson & Chakrabarti, 2009). Selain itu, kebutuhan, kapasitas dan ketrampilan perempuan sebagai sumber daya umumnya diabaikan dalam proses manajemen bencana baik dalam proses perencanaan, kedaruratan dan pemberian bantuan,

maupun pemulihan pasca bencana sehingga menjadi salah satu faktor penyebab kerentanan dan terpinggirkannya gender perempuan dalam bencana (Ashraf & Azad, 2015; Reyes & Lu, 2015).

Kerentanan perempuan Surakarta sebagai korban dalam bencana menurut (Leibo, Yuliani, & Humsona, 2015), diantaranya yaitu disebabkan karena mereka lebih sering tinggal di rumah dan bertanggungjawab pada tugas-tugas domestik seperti merawat anak, ternak, dan mengatur rumah tangga atau bahkan tidak bekerja sehingga menjadikan mereka sebagai korban yang lebih rentan dan dirugikan. Selain itu, perempuan di Surakarta yang mengalami dampak kerusakan fasilitas pasca bencana dengan tidak memiliki keluarga atau tidak bekerja lebih kesulitan mengakses bantuan atau melakukan pinjaman keuangan. Faktor penyebab lain adalah kondisi fisik dan sosial perempuan yang memengaruhi sikap tetap bertahan di daerah rawan bencana tidak mau direlokasi dan pendidikan yang rendah sehingga akses informasi tentang kebencanaan terbatas. Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa kerentanan gender perempuan terhadap bencana alam di Surakarta diantaranya disebabkan oleh kondisi sosial budaya, pengetahuan tentang bencana yang terbatas, dan kondisi fisik gender perempuan di Surakarta.

Melihat realitas dan fenomena kesenjangan dan kerentanan gender yang terjadi di Kota Surakarta, dalam hal ini sebagai contoh utamanya adalah terkait masalah kerentanan gender perempuan dan kesenjangan gender di bidang manajemen bencana. Berkaca dari amanah yang dimuat dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan dalam Pembangunan Nasional yang menekankan tentang pentingnya pengarusutamaan gender untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dikuatkan dengan adanya Perka BNPB Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana, oleh karena itu peran BPBD Kota Surakarta selaku badan pemerintah daerah sangatlah jelas dan penting guna mendukung adanya penghapusan kesenjangan gender dan terwujudnya manajemen bencana yang responsif gender.

Manajemen bencana (*disaster management*) merupakan salah satu upaya yang meliputi aspek perencanaan dan penanganan bencana dan bertujuan untuk mengurangi risiko bencana atau menghindari potensi kerugian dari bahaya bencana, penanganan secara cepat dan tepat dalam pemberian bantuan kepada korban bencana, dan mencapai pemulihan secara cepat dan efektif (Warfield, 2008; Nurjanah, Sugiharto, Kuswanda, Siswanto, Adikoesoemo, 2013; Wicaksono & Pangestuti, 2019). Manajemen bencana terdiri dari suatu proses terencana yang dilakukan untuk mengelola bencana dengan baik dan aman melalui tiga tahapan. Tahap pertama yaitu tahap pra-bencana yang terdiri dari kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini, tahap tanggap darurat/saat bencana dan tahap pasca bencana yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi, serta tahap pasca bencana yaitu terdiri dari kegiatan rehabilitasi, rekonstruksi dan penyembuhan (Ramli, 2010; Jayarathne, 2016; Sutanto, 2012). Munculnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang terjadi dalam manajemen bencana menjadi salah satu latarbelakang pentingnya

pengarusutamaan gender di bidang manajemen bencana. Pengarusutamaan Gender (PUG)/gender mainstreaming adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi suatu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan (Kemenpppa, 2017). Pengarusutamaan Gender secara lebih kompleks diartikan sebagai reorganisasi, perbaikan, pengembangan dan evaluasi suatu proses kebijakan dengan memasukkan strategi pencapaian kesetaraan gender dalam setiap kebijakan dan dalam semua tahapan (Chineka, Musyoki, Korl, & Chikoore, 2019; Alston, 2014).

Perempuan memiliki hak untuk berperan aktif dalam program-program manajemen bencana baik dalam identifikasi, desain, implementasi maupun evaluasi program. Dimensi perempuan dalam identifikasi, desain, implementasi maupun evaluasi program pada program-program inovasi layanan yang diberikan oleh BPBD Surakarta dalam tujuannya mewujudkan

manajemen bencana responsif gender memberikan gambaran apakah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surakarta sebagai organisasi pemerintah telah melakukan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan baik pada program manajemen bencananya.

Selain itu, sebagai upaya dukungan untuk mewujudkan manajemen bencana responsif gender, BPBD Surakarta memberikan program-program inovasi layanan terkait gender. Inovasi layanan (*service innovation*) merupakan suatu bentuk inovasi yang terdapat dalam suatu produk barang dan/jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi publik dan dapat berupa suatu produk fisik maupun non fisik (Windrum & Koch, 2008). Adapun inovasi layanan yang dilakukan BPBD Surakarta terkait gender diantaranya yaitu penggunaan data terpilah berbasis gender, sosialisasi kebencanaan dan mitigasi khusus perempuan, pelatihan dapur umum dan evakuasi perempuan, penetapan keanggotaan perempuan pada forum Kelurahan Tangguh Bencana, Trauma healing, dan Jitu Pasma.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan gambaran umum terhadap latar penelitian dan menjadi bahan pembahasan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam teknik analisis, yaitu teknik analisis data interaktif model Miles dan Huberman dalam Sutopo (2002:91) dan teknik analisis gender menggunakan teknik analisis Harvard step 4 (Overholt & Anderson & Cloud & Austin, 1985). Data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif baik dari data primer maupun sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Studi dokumentasi diambil dari berbagai data terkait pembahasan dari beberapa jurnal, artikel, berita, dan buku online.

Pembahasan

Dimensi Perempuan dalam Identifikasi, Desain, Implementasi dan Evaluasi Program

Dimensi perempuan dalam identifikasi, desain, implementasi maupun evaluasi program inovasi

layanan yang diberikan oleh BPBD Surakarta dalam tujuannya mewujudkan manajemen bencana responsif gender memberikan gambaran apakah BPBD Kota Surakarta sebagai organisasi pemerintah telah melakukan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan baik pada program manajemen bencananya. Dalam menilai dimensi perempuan tersebut dilakukan analisis melalui pertanyaan-pertanyaan sesuai kerangka analisis Harvard step 4 dengan hasil sebagai berikut ini:

1. Dimensi Perempuan dalam Identifikasi Program

Identifikasi program merupakan tahap dimana informasi tentang kebutuhan, kemungkinan kendala dan dampak negatif maupun positif program terhadap kelompok sasaran dikumpulkan dan diperhitungkan. Analisis dimensi perempuan dalam identifikasi program menjelaskan tentang bagaimana BPBD Surakarta mengidentifikasi kebutuhan atau peluang perempuan dalam program, mendefinisikan tujuan program hubungannya dengan perempuan dan kendala terkait

keterlibatan perempuan dalam program. Dimensi perempuan dilihat dari analisis kebutuhan praktis gender perempuan yang diidentifikasi dalam pelaksanaan manajemen bencana sebagai berikut:

Tabel 1 Identifikasi Pemenuhan Kebutuhan Praktis Perempuan

Kebutuhan Praktis	Keterangan
Alat mandi	Penyediaan Logistik Memadai
Handuk	Penyediaan Logistik Memadai
Pakaian dalam	Penyediaan Logistik Memadai
Pakaian muslim	Penyediaan Logistik Memadai
Pembalut	Penyediaan Logistik Memadai
Pil KB	Penyediaan Logistik Memadai
MCK tertutup	Penyediaan Fasilitas Memadai

Sumber: Data diolah oleh penulis

Adapun dimensi perempuan dapat dilihat dari analisis kebutuhan strategis gender perempuan dan peluang apa yang dapat diambil berdasarkan kebutuhan strategis yang

diidentifikasi dalam pelaksanaan manajemen bencana sebagai berikut:

Tabel 2 Identifikasi Pemenuhan Kebutuhan Strategis dan Peluang Perempuan

	Kebutuhan Strategis	Peluang Tindakan
Kontrol	Partisipasi Pengambilan Keputusan	Partisipasi anggota perempuan dalam personil internal BPBD, forum Kelurahan Tangguh Bencana dan forum Relawan
Akses	Pengetahuan terhadap bencana	Penyelenggaraan Sosialisasi Kebencanaan Khusus Perempuan
	Partisipasi Saat Bencana (Evakuasi)	Pelatihan Evakuasi Bencana bagi Relawan Perempuan

	Partisipasi Pasca Bencana	Pelatihan Dapur Umum dan Logistik
		Relawan Kesehatan/ Medis
		Relawan Program Trauma Healing
	Hak terhadap manfaat	Melalui Program Jitu Pasma

Sumber: Data diolah oleh penulis

2. Dimensi Perempuan dalam Desain Program

Tahapan dalam desain program adalah bagaimana suatu program didesain untuk dapat meningkatkan dampak positif dan mengurangi atau menghilangkan dampak negatif program terhadap kelompok sasaran. Analisis dimensi perempuan dalam desain program menjelaskan tentang bagaimana dampak program terhadap kegiatan, akses dan kontrol perempuan pada sumber daya dan manfaat yang perlu ditingkatkan. Desain program merupakan salah satu penentu apakah desain suatu

program tersebut dapat memberikan peningkatan dampak positif dan mengurangi atau menghilangkan dampak negatif atau tidak.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa komponen desain program yaitu lokus dan mode aktivitas program dalam inovasi layanan manajemen bencana telah memberikan beberapa peningkatan dampak positif baik pada akses maupun kontrol perempuan terhadap sumber daya dan manfaat. Selain itu, pembentukan desain program tersebut telah memberikan pengurangan dampak negatif yang dimiliki oleh perempuan seperti kemungkinan tidak terpenuhinya penyediaan bantuan logistik perempuan dengan keragaman umur di wilayah bencana, minimnya pengetahuan perempuan tentang bencana dengan perbedaan tingkatan kalangan dan jenis pekerjaan, dan lain-lain.

3. Dimensi Perempuan dalam Implementasi Program

Implementasi merupakan salah satu tahap penting dalam pembuatan suatu

program/kebijakan. Suatu program yang telah ditetapkan harus diimplementasikan agar membuat dampak dan mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Tanpa adanya implementasi, suatu program tidak akan mencapai tujuannya dan sia-sia. Analisis dimensi perempuan dalam implementasi program menjelaskan tentang perempuan kaitannya dengan area program seperti personil program, struktur organisasi, operasi, logistik, dan lain-lain.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa BPBD Surakarta dalam pelaksanaan program inovasi layanan manajemen bencana responsif gendernya telah memenuhi beberapa indikator dimensi perempuan dalam implementasi program. Kesadaran personil terhadap adanya kebutuhan khusus perempuan, ketrampilan dan teknik pelatihan yang dikembangkan untuk keberjalanan program, dan keterbukaan terhadap partisipasi kaum perempuan, hingga kerjasama dengan organisasi lain dalam hal pemenuhan sumber daya

juga telah dilakukan oleh BPBD Surakarta mulai dari bidang kesehatan/medis, relawan, pemberi bantuan logistik, narasumber pelatihan, dan lain-lain. Dalam hal pendanaan juga telah direncanakan oleh BPBD Surakarta melalui Rencana Anggaran Responsif Gender (RARG) agar dapat memperhatikan kebutuhan anggaran untuk keadilan gender dalam pelaksanaan program.

4. Dimensi Perempuan dalam Evaluasi Program

Tahapan evaluasi program merupakan salah satu tahap akhir dari suatu program yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program yang telah dijalankan dan dampak atau kendala apa yang harus diatasi untuk selanjutnya. Analisis dimensi perempuan dalam evaluasi program dilakukan untuk mengevaluasi dampak program manajemen bencana terhadap perempuan yang harus diatasi oleh BPBD Surakarta. Adapun analisis dimensi perempuan dalam evaluasi program pada program inovasi layanan manajemen bencana BPBD

Surakarta antara lain sebagai berikut:

Tabel 3 Analisis Dimensi Perempuan dalam Evaluasi Program

Nama Program	Sistem Pemantauan dan Evaluasi			
	Efek Program Terhadap Perempuan	Analisis Aktivitas	Analisis Akses dan Kontrol	Keterlibatan Perempuan dalam Interpretasi Data
Penggunaan data terpilah	Diukur	Dianalisis dan diperbarui	Dianalisis dan diperbarui	Terlibat
Sosialisasi Kebencanaan dan Mitigasi Bencana	Diukur	Dianalisis dan diperbarui	Dianalisis dan diperbarui	Terlibat
Pelatihan Dapur Umum dan Evakuasi Bencana	Diukur	Dianalisis dan diperbarui	Dianalisis dan diperbarui	Terlibat
Forum Kelurahan Tangguh Bencana	Diukur	Dianalisis dan diperbarui	Dianalisis dan diperbarui	Terlibat
Trauma Healing	Diukur	Dianalisis dan diperbarui	Dianalisis dan diperbarui	Terlibat
Jitu Pasma (Kajian Kebutuhan Pasca Bencana)	Diukur	Dianalisis dan diperbarui	Dianalisis dan diperbarui	Terlibat

Sumber: Data diolah oleh penulis

Inovasi Layanan Organisasi BPBD Kota Surakarta

Pelaksanaan manajemen bencana responsif gender merupakan salah satu wujud pengembangan

layanan yang diberikan oleh BPBD Surakarta kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan pemenuhan hak asasi setiap masyarakat secara menyeluruh. Inovasi layanan organisasi yang dilakukan oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta, yaitu dalam hal inovasi layanan antara lain sebagai berikut:

1. Penggunaan Data Terpilah Berbasis Gender

Data terpilah merupakan data yang dipilah berdasarkan berbagai jenis ciri atau karakteristik. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan manajemen bencana, data terpilah biasanya terdiri dari lokasi, jenis kelamin, umur dan keberagaman disabilitas. Apabila dikaitkan dengan tujuan analisis gender, maka data terpilah yang digunakan adalah data terpilah menurut jenis kelamin. Pemilahan berdasarkan jenis kelamin dalam berbagai tahapan manajemen bencana dapat memberikan informasi atau petunjuk mengenai status, peran, kondisi, dan kebutuhan masyarakat laki-laki dan perempuan serta permasalahan yang dihadapi dalam manajemen bencana sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan gender.

2. Sosialisasi Kebencanaan dan Mitigasi Bencana Khusus Perempuan

Sosialisasi kebencanaan kepada perempuan merupakan salah satu upaya yang dilakukan sebagai strategi dalam mitigasi atau Pengurangan Resiko Bencana (PRB). Hal tersebut juga sebagai upaya atau solusi yang tepat untuk dapat memberikan pengetahuan tentang bencana, bagaimana upaya dan peran apa yang dapat diberikan dalam pengurangan resiko terhadap bencana dan cara menghadapi bencana sehingga dapat lebih dipahami oleh perempuan.

3. Pelatihan Dapur Umum dan Evakuasi Bencana untuk Perempuan

Dalam upaya memanfaatkan peran aktif perempuan, BPBD Kota Surakarta memberikan fasilitas berupa pelatihan dapur umum kepada masyarakat salah satunya yaitu pada kelompok ibu-ibu dan pelatihan evakuasi bagi relawan khusus perempuan. Pelatihan tersebut merupakan upaya yang dilakukan BPBD Surakarta untuk meningkatkan akses, partisipasi dan kontrol perempuan secara langsung dalam proses manajemen bencana pada tahap pasca bencana. Hal ini dimaksudkan karena dalam

- bencana bukan hanya peran laki-laki yang paling penting dalam membantu korban bencana, tetapi perempuan juga berarti penting dalam kegiatan membantu penanganan korban bencana.
4. Partisipasi keanggotaan perempuan pada Forum Kelurahan Tangguh Bencana
Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah Desa/Kelurahan yang dibentuk dengan dasar memiliki kemampuan mandiri untuk dapat beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta dapat memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan masyarakat di masing-masing kelurahan yang mengalami kejadian bencana. Penetapan partisipasi keanggotaan perempuan dalam forum tersebut diharapkan perempuan dapat ikut andil dalam pengambilan keputusan terkait bagaimana pelayanan yang tepat bagi perempuan dan kebutuhan praktis maupun strategis apa yang dibutuhkan oleh gender perempuan dalam manajemen bencana yang tidak diketahui atau dipahami secara rinci oleh gender laki-laki.
 5. Pemulihan trauma bagi laki-laki dan perempuan pasca bencana
Pemulihan terhadap trauma yang dialami korban terdampak bencana dilakukan dengan memperhatikan penyesuaian terhadap kebutuhan masing-masing gender. Trauma pasca bencana yang dialami antara korban anak-anak, perempuan maupun laki-laki memiliki kondisi dan penyebab yang berbeda sehingga memerlukan penanganan yang berbeda-beda pula. Trauma healing penting untuk dapat menghilangkan kesedihan yang dialami para korban bencana, terutama pada perempuan dan anak-anak sebagai kelompok rentan sehingga diharapkan dapat memberikan semangat dalam menghadapi kondisi tersebut. Dalam kegiatan ini BPBD Surakarta bekerja sama dengan pihak PMI Surakarta dan tenaga medis di bidang psikologi dalam implementasinya.
 6. Program Jitu Pasna (Kajian Kebutuhan Pasca Bencana)
Jitu Pasna merupakan salah satu tahapan pasca bencana dalam manajemen bencana yang terdiri dari pengkajian dan penilaian

akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Program Jitu Pasma (Kajian Kebutuhan Pasca Bencana) dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi adanya peningkatan beban kelompok gender tertentu karena kerusakan infrastruktur pasca bencana. Gender perempuan dinilai sebagai korban yang paling dirugikan karena usaha ekonomi perempuan yang berbasis di rumah dan umumnya tidak bekerja di luar rumah sehingga sebagai korban bencana, perempuan menjadi kesulitan dalam mengakses bantuan berupa pinjaman dari lembaga keuangan formal.

Kendala Inovasi Layanan Organisasi BPBD Kota Surakarta

Pelaksanaan inovasi layanan organisasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surakarta dalam rangka mewujudkan manajemen bencana yang responsif gender tentunya mengalami berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut dapat

dijabarkan melalui analisis berdasarkan tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, sumber daya manusia, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Berikut ini adalah kendala-kendala pelaksanaan inovasi layanan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surakarta dalam mewujudkan manajemen bencana responsif gender antara lain sebagai berikut:

1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan

Pada salah satu pihak ada beberapa masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan. Namun, di pihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan memengaruhi mudah tidaknya suatu program dilaksanakan.

Kendala yang pertama yaitu dasar hukum peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di bidang manajemen bencana sudah ada dan telah diinstruksikan kepada setiap daerah untuk implementasinya, namun pelatihan dan sosialisasi

dari pusat kepada daerah masih terhitung kurang untuk memaksimalkan pelaksanaan inovasi layanan terkait gender di bidang manajemen bencana tersebut. Kendala yang kedua yaitu visi dan misi yang ditetapkan dari BPBD Surakarta sendiri belum mencerminkan bahwa BPBD Surakarta telah mendukung terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di bidang manajemen bencana. Kendala yang ketiga yaitu sosialisasi atau pengenalan gender di bidang manajemen bencana melalui web atau media sosial lainnya belum maksimal dilakukan. Penggunaan website BPBD utamanya belum dapat menyajikan data statistik gender dan berita terkini mengenai pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di BPBD Surakarta sehingga akses secara umum oleh publik tidak dapat dilakukan secara maksimal. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap tidak maksimalnya koordinasi bantuan logistik dan kebutuhan berbasis gender dengan pihak lain seperti forum kelurahan tangguh bencana, forum relawan,

dan lain-lain.

2. Sumber daya manusia

Kendala pelaksanaan inovasi layanan yang dilakukan oleh BPBD Surakarta dalam mewujudkan manajemen bencana yang responsif gender kaitannya dengan faktor sumber daya manusia yaitu kurangnya pelatihan dari pusat yang diberikan kepada BPBD Surakarta yang juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai untuk pelaksanaan inovasi layanan organisasi dalam mewujudkan manajemen bencana yang responsif gender, sehingga BPBD Surakarta dalam pelatihannya beberapa kali menggunakan narasumber dari luar atau kerjasama dengan pihak lain dalam beberapa pelaksanaan inovasi layanan tersebut. Sebagai contoh yaitu pada pemberian pendampingan psikologis pasca bencana, BPBD Surakarta secara penuh menyerahkan pelaksanaan pada Palang Merah Indonesia (PMI) Surakarta dan tenaga medis di bidang psikologi untuk membantu terselenggaranya inovasi layanan tersebut karena tidak adanya personil yang

memadai terkait pengetahuan tentang psikologi dari BPBD Surakarta sendiri.

3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi

Kendala pelaksanaan inovasi layanan dalam mewujudkan manajemen bencana responsif gender yang ketiga adalah proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif mudah dilaksanakan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar atau berimbang. Sebaliknya, suatu program akan relatif sulit dilaksanakan apabila sasarannya mencakup semua populasi atau besar.

Dalam pelaksanaan inovasi layanan dalam mewujudkan manajemen bencana yang responsif gender oleh BPBD Surakarta, salah satu kendala yang dialami yaitu terkait proporsi kelompok sasaran program yang besar sehingga relatif sulit untuk dilaksanakan. Proporsi jumlah penduduk perempuan dan laki-laki pada masing-masing wilayah di Surakarta memiliki jumlah yang cukup besar dengan kesenjangan jumlah antara laki-laki dan perempuan yang tidak

berimbang atau memiliki selisih yang lumayan banyak. Proporsi kelompok sasaran besar dan dengan kondisi umur maupun jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda sehingga relatif sulit dikoordinasi atau dalam pelaksanaan sosialisasi kebencanaan khusus perempuan.

4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan

Berbagai inovasi layanan yang dilakukan oleh BPBD Surakarta diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengarusutamaan gender di bidang manajemen bencana, pengetahuan kebencanaan berbasis gender dan peran aktif masyarakat dalam mendukung terciptanya manajemen bencana yang responsif gender secara menyeluruh di Surakarta. Hal tersebut mengalami kendala yaitu sulitnya pencapaian tujuan dikarenakan proporsi kelompok sasaran yang sangat besar, tidak berimbang dan heterogen. Selain itu, tidak maksimalnya sumber daya manusia yang memadai menjadi salah satu kendala yang menyebabkan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan tidak

dapat dicapai sepenuhnya.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dimensi perempuan dalam identifikasi program, desain program, implementasi program dan evaluasi program inovasi layanan manajemen bencana responsif gender secara umum telah memperhatikan kebutuhan dan peluang perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, serta efek atau dampak positif dan negative suatu program terhadap kegiatan perempuan.
2. Beberapa inovasi layanan organisasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surakarta dalam mendukung terwujudnya manajemen bencana responsif gender antara lain yaitu penggunaan data terpilah berbasis gender, sosialisasi kebencanaan dan mitigasi bencana khusus

perempuan sebagai upaya yang dilakukan untuk strategi dalam mitigasi atau Pengurangan Resiko Bencana (PRB), pelatihan dapur umum dan evakuasi bencana untuk perempuan, partisipasi keanggotaan perempuan pada Forum Kelurahan Tangguh Bencana, pemulihan trauma psikologis atau *trauma healing* bagi laki-laki dan perempuan pasca bencana dan program Jitu Pasna (Kajian Kebutuhan Pasca Bencana) untuk mengurangi adanya peningkatan beban kelompok gender tertentu karena kerusakan infrastruktur pasca bencana melalui pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan.

3. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surakarta terkait pelaksanaan inovasi layanan dalam mendukung terwujudnya manajemen bencana responsif gender antara lain sebagai berikut:

- a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Beberapa kendala yang ada yaitu visi dan misi yang ditetapkan dari BPBD Surakarta belum mencerminkan bahwa BPBD Surakarta telah mendukung terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di bidang manajemen bencana, sosialisasi atau pengenalan gender, penyajian data statistik gender dan berita terkini mengenai pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di BPBD Surakarta di bidang manajemen bencana melalui web atau media sosial lainnya belum dilakukan secara maksimal.
- b. Sumber daya manusia. Kualitas dan kemampuan atau ketrampilan sumber daya manusia yang kurang memadai dari internal BPBD Surakarta untuk beberapa pelaksanaan inovasi layanan organisasi dalam mewujudkan manajemen bencana yang responsif gender.
- c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Proporsi kelompok sasaran besar, jumlah laki-laki dan perempuan tidak berimbang dan dengan kondisi umur, jenis pekerjaan serta tingkat pendidikan yang berbeda-beda sehingga pencapaian tujuan program relatif sulit dilakukan.
- d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan yaitu meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengarusutamaan gender di bidang manajemen bencana, pengetahuan kebencanaan berbasis gender dan peran aktif masyarakat dalam mendukung terciptanya manajemen bencana yang responsif gender secara menyeluruh di Surakarta sulit dicapai dengan proporsi kelompok sasaran yang cukup luas dengan tanpa adanya dukungan dari

sumber daya manusia yang memadai.

Saran

1. Perlu adanya inovasi pada visi dan misi organisasi guna mendukung pelaksanaan inovasi-inovasi layanan lain terkait manajemen bencana responsif gender di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surakarta.
2. Perlu adanya inovasi terkait sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di bidang manajemen bencana melalui media berupa spanduk, banner, buku, leaflet, website, dan lain-lain.
3. Penyajian data statistik gender dan update berita terkini pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta inovasi-inovasi layanan manajemen bencana responsif gender yang dilakukan oleh BPBD Surakarta di web resmi BPBD Surakarta.
4. Perlu adanya pelatihan yang sesuai kebutuhan terhadap personil program agar dapat mendukung terselenggaranya program-program inovasi

layanan yang dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

Daftar Pustaka

- Alston, M. (2014). Gender mainstreaming and climate change, *Journal of Women's Studies*, 47(B), 287–294
- Ashraf, M., A., & Azad, A., K. (2015). Gender Issues in Disaster: Understanding The Relationships of Vulnerability, Preparedness and Capacity. *Environment and Ecology Research*, 3(5), 136-142. doi: 10.13189/eer.2015.030504
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2017). *Potensi dan Ancaman Bencana*. Diakses dari www.bnpb.go.id
- Crawford, M., & Unger, R. (2000). *Women and Gender*. New York, NY: McGraw Hill.
- Chineka, J., Musyoki, A., Kori, E. & Chikoore, H. (2019). Gender mainstreaming: A lasting solution to disaster risk reduction. *Journal of Disaster Risk Studies*, 11(3), a723. doi: 10.4102/jamba.v11i3.723
- Enarson, E., & Chakrabarti, P., G. (2009). *Women, Gender and Disaster: Global Issues and Initiatives*. New Delhi: SAGE Publications.
- Fakih, M. (2016). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Gaillard, J., C., Sanz, K., Balgos, B., C., Dalisay, S., N., Murray, A., Smith, F., & Toelupe1, V. (2016). *Beyond Men and*

- Women: A Critical Perspective On Gender and Disaster. doi:10.1111/disa.12209
- Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan dalam Pembangunan Nasional
- Jayarathne, S., S. (2016). Women's Potential in Dealing with Natural Disasters: A Case Study from Sri Lanka. *Asian Journal of Women's Studies*, 20(1), 125-136. doi: 10.1080/12259276.2014.11666175
- Kemenpppa. (2017). *Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016*. Diakses dari www.kemenpppa.go.id
- Leibo, J., Yuliani, S., & Humsona, R. (2015). Mengurangi Tingkat Kerentanan Terhadap Bencana Melalui Kebijakan Mitigasi Berbasis Kebutuhan Gender: Studi di Provinsi Jawa Tengah. Draft Laporan Penelitian Hibah Unggulan Fakultas Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Mayner, L., & Arbon, P. (2015). Defining: The Need for Harmonisation of Terminology. *Australasian Journal of Disaster and Trauma Studies*, 19(Special Issue), 21-25
- Nurjanah, Sugiharto, R., Kuswanda, D., Siswanto & Adikoesoemo. (2013). *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta
- Oakley. (2015). *Sex, Gender and Society*. United Kingdom: Ashgate.
- Overholt, C., Anderson, M. B., Cloud, K., & Austin, J. E. (1985). *Gender Roles in Development Projects: A Case Book*. United States: Kumarian Press.
- Phillips, S., P. (2005). Defining and measuring gender: A social determinant of health whose time has come. *International Journal for Equity in Health*, 4(11). doi:10.1186/1475-9276-4-11
- Perka BNPB Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana
- Ramli, S. (2010). *Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran (Fire Management)*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Reyes, D., D., & Lu, J., L. (2015). Gender Dimension in Disaster Situations: A Case Study of Flood Prone Women in Malabon City, Metro Manila. *Journal of Disaster Risk Reduction*. doi: 10.1016/j.ijdrr.2015.11.001i
- Shaluf, I., M., & Ahmadun, F. (2006), Disaster Types in Malaysia: An Overview. *Journal of Disaster Prevention and Management*, 15(2), 286-98
- Sutanto. (2012). Peranan K3 dalam Manajemen Bencana, *Jurnal Metana*, 8(2), 37-40.
- Sutopo, H. B. (2002). *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Warfield, C., (2008). *The Disaster Management Cycle*. Diakses dari http://www.gdrc.org/uem/disasters/1-dm_cycle.html
- Wicaksono, R., D., & Pangestuti, E. (2019). Analisis Mitgasi Bencana Dalam Meminimalisir Risiko Bencana (Studi pada Kampung Wisata Jodipan Kota Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 71(1)

Windrum, P., & Koch, P. (2008).
*Innovation in Public Sector
Service: Entrepreneurship,
Creativity, and Management.*
United Kingdom: Edward
Elgar.